

7. PROVINSI JAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang jumlah penduduknya terbesar di Indonesia (18 % dari total penduduk di Indonesia) tersebar di 25 kabupaten/kota, sehingga membawa konsekuensi yang besar bila terjadi bencana, baik korban jiwa maupun harta benda. Dalam kaitan bencana gempa, Jawa Barat berada pada jalur gempa tektonik, yang topografinya bergunung-gunung dan aliran sungai yang umumnya bermuara di wilayah Pantai Utara, maka di beberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain. Dari survei yang dilakukan, diperoleh data kejadian-kejadian bencana dan jumlah korban sejak tahun 2005 hingga tahun 2007, seperti tertera di bawah ini.

No	DATA BENCANA	TAHUN		
		2005	2006	Jan-Nov 2007
Frekuensi Kejadian Bencana :				
1	Kebakaran	148 Kali	262 Kali	17 Kali
2	Banjir	38 Kali	94 Kali	128 Kali
3	Tanah Longsor	44 Kali	98 Kali	77 Kali
4	Angin Topas	125 Kali	84 Kali	27 Kali
5	Gempa Bumi	4 Kali	16 Kali	
Korban Manusia :				
1	Meninggal Dunia	201 Org	600 Org	44 Org
2	Luka-luka	58 Org	1136 Org	10.195 Org
3	Kepala Keluarga Menderita	40.819 KK	23.664 KK	186.967 KK
4	Jiwa Menderita	179.070 Jiwa	80.246 Jiwa	743.207 Jiwa
Kerusakan Rumah :				
5	Rusak Ringan	2.994 Buah	2.932 Buah	65.229 Buah
6	Rusak Berat	2.351 Buah	4.173 Buah	1.207 Buah
7	Hancur	606 Buah	932 Buah	301 Buah
8	Terancam	385 Buah	675 Buah	1.262 Buah
Sarana dan Prasarana :				
10	Sekolah	91 Buah	60 Buah	873 Buah
11	Tempat Ibadah	89 Buah	51 Buah	356 Buah
12	Sawah	20.863 Ha	4.071 Ha	68,475 Ha
13	Daratan	138 Ha	10.043 Ha	1.160,3 Ha
Taksiran Kerugian (Rp)		13.287.921.945	58.191.976.546	28.184.095.000

Memperhatikan data tabel bencana di atas, sungguh kejadian itu terjadi pada setiap tahunnya dan mengakibatkan kerugian baik nyawa maupun harta benda. Maka untuk itu, perlu ada upaya yang terkoordinasi untuk penanggulangannya dengan tujuan meminimalisir korban manusia.

B. POTENSI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA BARAT

Mengingat letaknya yang rawan gempa, maka setiap tahun terutama pada musim penghujan, selalu ada kejadian bencana. Dan jika ditilik dari kondisi lingkungan di Jawa Barat, maka akan diperoleh gambaran yang sungguh memprihatinkan. Betapa tidak, berbagai kerusakan telah terjadi dimana-mana. Dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap wilayah ini maka terdapat beberapa potensi bencana yang ada, yaitu :

1. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang dapat disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau runtuhnya batuan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dan mencapai daerah yang luas sehingga menimbulkan banyak korban dan merupakan gempa yang paling sering dirasakan di Indonesia. Gempa akibat aktivitas vulkanisme yang sering terjadi di Provinsi Jawa Barat terutama akibat aktivitas Gunung Gede, Gunung Papandayan, Patuha, Tangkupan perahu, Galunggung, yang tentu saja akan berdampak langsung pada penduduk yang berdiam di wilayah sekitar pegunungan tersebut. Sebagai bagian aktivitas vulkanisme, ancaman bahaya yang ditimbulkan terkait juga dengan dengan letusan gunung berapi seperti piroklastik, debu, awan panas dan sebagainya. Gempa sebagai akibat dari aktivitas tektonik beberapa kali terjadi di Provinsi Jawa Barat yang dalam sejarah pembentukannya merupakan bagian dari lempeng Eurasia yang bertumbukan dengan lempeng Indo-Australia. Akibat tumbukan tersebut, lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dan terjadi akumulasi energi yang pada titik jenuhnya akan menyebabkan gempa.

2. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter, kecepatannya dapat mencapai 942,9 km/jam dengan panjang gelombang mencapai lebih dari 100 m, tinggi tidak lebih dari 60 m dan selisih waktu antar puncak antara 10 menit hingga 1 jam. Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk, atau muara sungai, panjang gelombang menurun kecepatannya namun tinggi gelombang meningkat hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitudo lebih dari 6 SR. Namun demikian, tsunami juga dapat diakibatkan oleh tanah longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut.

Peristiwa tsunami telah beberapa kali menghantam wilayah Jawa Barat terutama di. Tsunami terakhir terjadi pada tahun 2006 dan menimbulkan dampak parah di daerah pantai Pangandaran dan sekitarnya. Selain jatuhnya korban jiwa, juga terdapat kerusakan sarana penangkap ikan serta kerusakan lingkungan pantai.

3. Letusan Gunung Berapi

Gunung berapi merupakan lubang kepundan/rekahan pada kerak bumi tempat keluarnya magma, gas atau cairan lainnya ke permukaan. Bencana gunung meletus disebabkan oleh aktifnya gunung berapi sehingga menghasilkan erupsi. Bahaya letusan gunung berapi dapat berpengaruh secara langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder). Bahaya primer letusan gunung berapi adalah lelehan lava, aliran piroklastik (awan panas), jatuhnya piroklastik, letusan lahar dan gas vulkanik beracun. Bahaya sekunder adalah ancaman yang terjadi setelah atau saat gunung berapi tidak aktif seperti lahar dingin, banjir bandang dan longsor material vulkanik.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat sejumlah gunung api yang masih aktif hingga kini yaitu Gunung Gede di tasikmalaya, Gunung Papandayan di wilayah Garut, Gunung Patuha di Kabupaten Bandung, Gunung Tangkupan Perahu, Guntur dan juga Gunung Galunggung, yang letusannya pernah menimbulkan hujan abu yang hebat.

4. Banjir

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang buruk atau jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air.

Jawa Barat juga memiliki karakteristik perpaduan antara daerah pegunungan yang berada di Wilayah Selatan dan dataran rendah di Wilayah Pantai utara (Pantura). Memiliki curah hujan yang tinggi (rata-rata 219mm/th). Dengan curah hujan yang tinggi tersebut, jelas mengakibatkan air sungai meluap terkena wilayah Pantura.

Propinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara memiliki luas total 3.720.772 hektare dengan luas daratan sekitar 3.555.502 Ha sisanya berupa perairan. Dari luas daratan memiliki Sumber Daya Hutan seluas 816.603 ha (22.97 % dari luas daratan). Telah semakin kritisnya hutan-hutan yang ditandai dengan pembabatan pohon yang tidak terkontrol, sehingga manakala terjadi hujan maka akan semakin mudah terjadi banjir yang melanda di berbagai wilayah di Jawa Barat.

5. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Jawa Barat pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan.

Topografi, geografi, dan wilayah Jawa Barat identik dengan Bukit Lawang (Sumut), Banjarnegara (Jateng), dan Jember (Jatim). Bahkan pergerakan tanah di Jawa Barat lebih rentan karena intensitas curah hujannya lebih tinggi. Akibatnya wilayah Jawa Barat

sangat rentan dengan bencana longsor. Longsor adalah krisis warga yang paling sering terjadi di 73 kecamatan yang berada di 12 kabupaten/kota di Jabar yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Subang, dan Purwakarta. Selain itu juga terdapat terdapat 533 titik rawan longsor yang tersebar di 14 Kawasan Pemangku Hutan (KPH) milik Perum Perhutani III Jawa Barat dan Banten. Dari jumlah itu, 25 diantaranya merupakan daerah sangat rawan longsor yaitu 20 titik di Jawa Barat sisanya di wilayah Banten. Dari data Perhutani III Jawa Barat-Banten, daerah yang mempunyai titik rawan longsor terbesar yaitu Bandung Selatan 83 titik, Tasikmalaya 66 titik, Cianjur 58 titik, dan Sukabumi 47 titik. Sementara lokasi sangat rawan longsor antara lain, Subang di Kuningan, Baturanjak di Majalengka, Cimalaka dan Tanjungkerta di Sumedang, serta Gunung Halu di Bandung, dan Campaka di Cianjur. Khusus wilayah III Cirebon, daerah rawan longsor kawasan Perhutani III terdapat di Kabupaten Kuningan sebanyak 42 titik dan Kabupaten Majalengka 16 titik.

6. Kekeringan

Pemanasan global terjadi karena meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Penyebab utama pemanasan ini adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepaskan karbondioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ketika atmosfer semakin kaya gas rumah kaca maka akan menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas matahari yang dipancarkan ke Bumi. Daerah dengan iklim hangat akan menerima curah hujan yang lebih tinggi, tetapi tanah akan lebih cepat kering. Kekeringan tanah akan merusak tanaman bahkan menghancurkan suplai makanan. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Jawa Barat

Krisis kekeringan terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Sumedang, Garut, Bandung, Cianjur, Sukabumi kondisi terberat memang terjadi di Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Subang. Krisis ini sudah mengarah kepada penguasaan air. Konflik horizontal perebutan air bersih untuk perumahan dan pertanian tidak dapat dielakkan lagi.

Krisis ini adalah kegagalan pengurus wilayah dalam mengelola DAS sebagai penyuplai untuk pengairan dan minum. Krisis yang paling besar terjadi di kawsana Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau biasa disebut Ciayumajakuning. Sumber air permukaan di kawasan Ciaumajakuning berasal dari sungai dan waduk. Beberapa sungai utama yaitu sungai Cipaniis, Cilengkrang, Cimanuk, Bangkaderes, Jurangjero dan Cisanggarung. Kondisi sungai ini mengalami krisis penurunan debit. Cimanuk dan Ciranggarung merupakan sumber air terbesar yang menyuplai Ciayumajakuning, Sehingga sumber air permukaan lainnya ikut menyusut di antaranya:

- SituSedong (1,5 Juta m³) yang berada Kec. Sedong, Kot.Cirebon bahkan nyaris kering hanya tersisa 168.000 m³[4]. Situasinya tak jauh berbeda dengan Setu Sedong, cadangan air terus menipis, seperti di Rawa Bolang Kec. Cikedung dan Cipancuh Kec. Haurgeulis
- Situpatok (14Juta m³) yang berada di Kecamatan Mundu Kab. Cirebon menyusut hingga tinggal 6,35 juta m³. Hal itu berarti, terjadi penurunan mencapai 50 persen lebih dari kapasitas normal

- Waduk Darma (38,9 juta m³) yang berada di Kuningan menyusut hingga 7 Juta m³, waduk ini menyuplai air di Kuningan dan wilayah timur selatan Kab. Cirebon . Selain untuk irigasi waduk ini juga dipakai sebagai sumber minuman.
- Bendung Rentang Jatitujuh Majalengka, mengalami pengurangan debit air hanya 14,133 m³/dt. Terbagi dua saluran induk (SI), masing-masing SI Cipelang yang hanya mampu melayani areal persawahan di Indramayu barat dengan debit 4,824 m³/dt dan SI Sindupraja untuk sebagian Indramayu timur dan Cirebon, tinggal 9,309 m³/dt. Padahal, kapasitas normal Bendung Rentang mencapai lebih dari 61.000 m³/dt. Sedangkan kebutuhan air untuk areal persawahan Indramayu dan Cirebon sebesar 61.135 m³/dt, masing-masing untuk SI Cipelang 32,195 m³/dt dan Sindupraja 28.940 m³/dt.
- Kebutuhan normal pengairan untuk areal pertanian di Ciayumaja mencapai 60 m³/dt lebih. Debit Bendung Cikesik yang menampung air sungai Cisanggarung, tinggal tersisa 3,262 m³/dt. Padahal kapasitas distribusi air yang dibutuhkan mencapai 10 m³/dt. Penyusutan di Setu Sedong merupakan sumber air yang paling parah. Air tinggal 10 persen, padahal kebutuhan air untuk wilayah sekitarnya masih sangat tinggi.

C. EVALUASI SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

Dari sebaran kejadian dan potensi bencana yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jenis bencana alam yang sangat beragam dengan frekuensi bencana yang juga sering terjadi sehingga sudah selayaknya jika daerah ini memiliki kebijakan dan strategi serta program-program yang tidak hanya diarahkan untuk mengatasi darurat bencana namun program yang bersifat antisipatif dan terencana dengan baik.

1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan penanggulangan bencana akan ditinjau dari beberapa sisi yaitu dari sisi berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang bencana itu sendiri, kebijakan lain yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana serta kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran di bidang kebencanaan. Untuk selanjutnya akan dideskripsikan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun dan diterapkan di Provinsi Jawa Barat.

1.1. Peraturan tentang Penanggulangan Bencana

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana, maka untuk Jawa Barat belum ada peraturan setingkat Perda yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana. Namun kesadaran dan keinginan untuk menyusun Perda tentang Penanggulangan bencana sudah mulai menjadi wacana baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.

Kebijakan lain yang secara khusus mengatur penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi belum ada, namun cenderung di atur

berupa prosedur tetap, yang akan kita bahas di bagian operasional sistem penanggulangan bencana.

1.2. Peraturan Terkait Lainnya

Pada dasarnya terdapat berbagai kebijakan yang terkait erat serta mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan tata ruang. Untuk Provinsi Jawa Barat, kebijakan tata ruang telah disusun dan ditetapkan dan sudah memperhitungkan aspek bencana. Namun dalam proses implementasinya terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

- Pertentangan Kepentingan, yaitu antara kepentingan ekonomi jangka pendek sesaat dan kepentingan pelestarian jangka panjang dan juga kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- Ketidakmampuan dalam pengendalian tata ruang wilayah, misalnya perubahan kawasan dan fungsi lindung menjadi kawasan budidaya/pemukiman.

Kemampuan untuk menegakkan hukum sangat dibutuhkan di Jawa Barat demi menjaga kelestarian alam dan mencegah bencana yang lebih besar di masa yang akan datang.

1.3. Sistem Kelembagaan

Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah membentuk Satkorlak sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatasi bencana, maka dengan dikeluarkannya UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi perubahan lembaga dari Satkorlak menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pasal 18).

Ternyata amanat UU No.24 Tahun 2007 ini belum diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena dalam SOTK yang baru belum ada penetapan tentang pembentukan BPBD. Propinsi Jawa Barat cenderung menunggu aturan yang lebih jelas dari pemerintah pusat tentang pembentukan BPBD untuk menghindari kesalahan implementasi dan kesalahan pemahaman akan tupoksi BPBD dan eselonisasi bagi pejabat yang akan duduk di dalam BPBD.

Untuk fungsi penanggulangan bencana, terutama untuk tahap tanggap darurat dan pasca bencana masih tetap diemban oleh sejumlah SKPD dan masih menerapkan pola koordinasi yang telah diterapkan sebelumnya.

1.4. Kebijakan di Bidang Penganggaran

Sebuah kebijakan tanpa disertai anggaran akan sulit mencapai tujuannya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, untuk Provinsi Jawa Barat masalah ini tetap menjadi satu isu yang penting untuk dipecahkan karena memang belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang alokasi anggaran untuk bencana. Anggaran untuk program/kegiatan yang terkait kebencanaan, tersebar di SKPD yang memiliki tupoksi kebencanaan dan belum tentu diperoleh secara reguler tiap tahun.

2. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

Untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, maka perlu disusun sejumlah strategi. Dalam kegiatan kajian ini, maka strategi yang dimaksud adalah menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan di daerah, karena dengan cara seperti ini maka keberlangsungan program dan kegiatan akan terwujud, disamping juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak maka diperoleh informasi bahwa penanggulangan bencana saat ini sudah dibahas dan akan menjadi bagian dari program pembangunan jangka panjang untuk Jawa Barat, sehingga diharapkan program-program penanggulangan bencana akan tetap mendapat perhatian dari berbagai kalangan terutama dari pemerintah dan legislatif.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Seiring dengan proses integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam RPJP, maka integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD dan proses ini masih dalam proses dan belum selesai dan kemungkinan besar akan diintegrasikan setelah terpilihnya Gubernur baru di Jawa Barat.

2.3. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang berupaya dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan namun belum selesai dan masih pada tahap penyusunan.

2.4. Rencana Kerja Tahunan SKPD

Kegiatan penanggulangan bencana sudah menjadi bagian dari Renja SKPD meskipun rencana tersebut masih bersifat sektoral dan lebih mengarah pada upaya antisipatif. Dari sebagian besar program dan kegiatan yang ada di SKPD, sebagian besar diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran dan banjir serta tanah longsor. yang memang menjadi bencana tahunan di Jawa Barat.

2.5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana secara reguler tersebar di seluruh SKPD terkait, sesuai dengan tupoksi-nya. Besaran anggaran masih terbatas untuk kegiatan rutin yang mendukung tupoksi. Bila terjadi bencana bisa juga diambilkan dari pos biaya tak terduga yang dimiliki oleh SKPD dan Sekda.

3. SISTEM OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan sistem operasional penanggulangan bencana adalah prosedur-prosedur tetap yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan bencana, tata komando dan tata komunikasi serta aspek-aspek operasional lainnya.

3.1. Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana

Sama seperti di wilayah lain di Indonesia, untuk penanggulangan bencana pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menggunakan berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui sejumlah departemen yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana dan kadangkala menerapkannya secara utuh.

3.2. Tata Komando dan Komunikasi Penanggulangan Bencana

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, saat ini lembaga yang mengemban tugas penanggulangan bencana di provinsi Jawa Barat adalah Satkorlak dan Kesbanglinmas dan ini tentu saja mempengaruhi tata komando dan komunikasi penanggulangan bencana. Saat ini tata komando jika terjadi bencana ada pada Ketua Satkorlak dengan, Kesbanglinmas sebagai leading sektor. Sebagai pelaksana langsung adalah SKPD terkait sesuai dengan bidang keahliannya. Komunikasi inter dan intra SKPD relatif lancar dan bersifat koordinatif, masing-masing SKPD akan mengambil peran sesuai dengan TUPOKSI-nya.

D. EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah sistem maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas implementasi dari sistem tersebut. Dalam kajian ini terdapat sejumlah aspek yang digunakan dan hasil dari evaluasi atas implementasi tersebut dapat dilihat dalam tabel- tabel berikut ini:

1. Evaluasi Aspek Kebijakan

Evaluasi dari aspek kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	ASPEK	HASIL EVALUASI
1	Efektifitas kebijakan dalam mengurangi risiko bencana dan saat bencana terjadi	<ul style="list-style-type: none">• Karena kebijakan (Perda) yang mendukung penanggulangan bencana belum ada, maka efektifitas dari kebijakan tersebut belum bisa dinilai.
2	Hambatan dalam penyusunan kebijakan di bidang penangulangan bencana (pusat maupun daerah)	<ul style="list-style-type: none">• Masih banyak terjadi ketidak sesuaian antara desain yang diharapkan oleh pusat dengan realitas pelaksanaan di daerah.• Masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah tidak selalu sama
3	Sinergi implementasi antar peraturan (adakah yang	<ul style="list-style-type: none">• Masih ada kontraproduktif antara peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi/lembaga dan

	saling kontraproduktif)	departemen.
4	Tingkat dukungan politik terkait kebijakan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan politik dari berbagai pihak (Legeslatif, Perguruan Tinggi dan LSM) sangat baik.
5	Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan pusat (antara lembaga/instansi dan departemen) berdampak pada lemahnya komitmen dan kepercayaan dari daerah Masih ada kesan bahwa daerah cenderung reaktif, tidak pro aktif. Sikap menunggu kebijakan dari pusat dirasa lebih aman.

Sumber: Hasil Analisis

2. Evaluasi Aspek Strategi

Evaluasi dari aspek strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	ASPEK	HASIL EVALUASI
1	Proses penyusunan rencana-rencana di bidang penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Rencana khusus untuk penanggulangan bencana belum disusun. SKPD menyusun kegiatan sebatas untuk mendukung TUPOKSI. Program dan kegiatan direncanakan/diusulkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan TUPOKSI-nya
2	Mekanisme integrasi rencana strategis penanggulangan bencana ke dalam renja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Karena tidak ada rencana strategis yang secara khusus diarahkan untuk bencana maka tidak ada mekanisme khusus untuk integrasi rencana strategis ke dalam renja SKPD
3	Hambatan dalam penyusunan rencana dan implementasi rencana penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Karena kegiatan diusulkan secara sektoral oleh SKPD, maka masih ditemui adanya tumpang tindih kegiatan yang serupa
4	Hambatan dalam alokasi anggaran terkait dengan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran untuk kebencanaan tersebar di SKPD terkait. Selama ini SKPD merasakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. Tidak ada alokasi khusus untuk bencana
5	Hambatan dalam meraih komitmen SKPD dan mekanisme koordinasi dalam melaksanakan rencana-rencana penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat hambatan koordinasi akibat ego sektoral.

Sumber: Hasil Analisis

3. Evaluasi Aspek Operasional

Evaluasi dari aspek operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	ASPEK	HASIL EVALUASI
1	Hambatan dalam implementasi protap di lapangan	<ul style="list-style-type: none">• Protap yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, namun untuk tahap selanjutnya perlu disusun prosedur baku yang akan menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana
2	Hambatan dalam implementasi tata komando dan tata komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Secara umum tata komando dan komunikasi sudah berjalan meskipun masih diwarnai dengan ego sektoral.

Sumber: Hasil Analisis